

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang dinamika partisipasi masyarakat dalam tata kelola ekowisata, yang mana pada fokus penelitian ini ingin melihat perwujudan dari suatu aktivitas inisiatif partisipasi masyarakat maupun peran masyarakat, dimana peran masyarakat itu sendiri berkaitan dengan adanya keterlibatan secara langsung maupun yang paling berperan dalam pengelolaan ekowisata di kawasan Wana Tirta. Berikut tempat dari lokus penelitian ini merupakan kawasan ekowisata hutan mangrove Wana Tirta di Kabupaten Kulon Progo.

Masyarakat ekowisata internasional atau (TIES, 2000) menyebutkan ekowisata adalah suatu bentuk kegiatan wisata yang bertanggung jawab atas alam dengan melakukan kegiatan berupa melestarikan lingkungan beserta dapat menunjang kesejahteraan masyarakat setempat. Masyarakat Ekowisata Indonesia (MEI) mengakui sejak 1996, bahwa kegiatan ekowisata yang di lakukan dapat diartikan sebagai kegiatan yang secara tidak langsung memberdayakan masyarakat/penduduk lokal (Arida Sukma, 2017).

Ekowisata pada dasarnya di kembangkan dan di lakukan di suatu daerah atau pada suatu tempat yang relatif masih bersifat alami belum terkontaminasi (tercemari) dan dapat di kategorikan sebagai habitat lingkungan yang masih asri dan belum terganggu dan juga merupakan salah satu bentuk kegiatan wisata yang memberikan hiburan wisata lingkungan alam, adanya kegiatan ekowisata bertujuan agar masyarakat secara inisiatif turut membantu kesadaran mengembangkan kegiatan konservasi langsung dan bisa mengambil beberapa pengalaman pengetahuan mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan alam di kawasan tersebut agar tetap terjaga dan bisa di rasakan manfaatnya oleh banyak masyarakat kedepannya (Arida Sukma, 2017).

Berdasarkan PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2009, yang mana bertujuan untuk menyesuaikan substansi maupun muatan di dalam suatu pedoman pengembangan ekowisata di daerah, yang mana dapat memberikan suatu penguatan kepada kelembagaan dan tata kelola dalam pengembangan ekowisata di daerah, sehingga mendorong sinergitas dan adanya kerja sama perangkat daerah yang berkaitan dengan ekowisata di daerah, lalu mendorong adanya kerjasama antar daerah di dalam suatu pengembangan kegiatan ekowisata, sehingga dapat memberikan suatu pedoman kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan ekowisata di daerah, beserta membangun adanya komitmen antar kementerian atau lembaga dalam mendorong maupun mengawal pengembangan ekowisata di daerah.

Pengembangan ekowisata merupakan suatu langkah yang bisa dibilang sangat tepat karena bisa memberikan kesempatan untuk merubah keadaan menjadi lebih baik, seperti dapat mengatasi faktor kemiskinan, serta dapat membudayakan, dan memelihara kelestarian lingkungan alam. Dengan melakukan pengembangan ekowisata, akan banyak menciptakan peluang tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat setempat, tidak hanya itu, pengembangan ekowisata bisa meningkatkan konservasi alam, dan bisa menguatkan inisiatif masyarakat untuk terus mempertahankan dan menjaga warisan budaya beserta mata pencaharian mereka dengan menyediakan area wisata yang di kelola (Baiquni dkk, 2013).

Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang yang banyak memiliki jumlah area hutan mangrove yang sangat luas di dunia hingga di tingkat ASEAN, dan memiliki banyak keberagaman hayati terbesar dan unik yang bervariasi (Bengen, 2000). Tercatat luas hutan mangrove yang ada di Indonesia, berkisar 3.257.700 ha (Supriharyono, 2000). Fungsi hutan mangrove di wilayah pesisir itu secara fisik tidak hanya melindungi ekosistem yang ada di daratan saja tapi juga bisa menjadi pelindung bagian pesisir lainnya seperti bisa menjaga bagian ekosistem di dalam laut seperti padang lamun dan ekosistem terumbu karang (Saputra, D.K dkk, 2019).

Adanya pengesahan suatu Peraturan daerah Pemerintah Daerah DIY No. 16 Tahun 2012 mengenai Zonasi kawasan pesisir DIY dan usaha suatu penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo mengenai zonasi kawasan pesisir kabupaten Kulon Progo yang sangat merencanakan dan di peuntukkan per lahan per kondisi pada setiap sempadan pantai khususnya semua lahan kepesisiran Kulon Progo (Buletin Pokja Mangrove V, 2013). Pengembangan hutan mangrove bisa di katakan sebagai upaya proses dalam meningkatkan suatu manfaat yang dapat di terapkan dalam proses pengelolaan hutan mangrove, bertujuan digunakan untuk sebagai titik tunjangan kehidupan masyarakat, jika dilihat dari segi ekonomis maupun sosial berfungsi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lumayan untuk masyarakat, contohnya seperti masyarakat bisa membangun destinasi pengembangan ekowisata yang bertemakan hutan mangrove yang dimana jika di kelola dengan baik masyarakat bisa mendapatkan tambahan pendapatan dari wahana wisata yang dapat menambah pendapatan negara maupun daerah yang telah di kelola menjadi kawasan ekowisata (Novianti, 2016).

Ekowisata mangrove merupakan suatu lingkup kawasan yang dimana memang di khususkan untuk di rawat dan di jaga yang berlandaskan untuk kepentingan pariwisata, kawasan atau wilayah hutan mangrove merupakan kawasan yang berada di dekat lingkup pesisir atau pantai yang mempunyai keunikan yang khas tersendiri, karena kawasannya terletak di dekat muara sungai (estuaria), mangrove berkembang tumbuh dan menyebar di bagian daerah tropis dan subtropis dengan keberagaman makhluk hidup di dalamnya (Rahim dkk, 2017).

Pengembangan ekowisata hutan mangrove memiliki dua konsep wisatawan yang berkunjung yaitu, yang pertama *new tourism* yang berarti jika ada wisatawan yang datang berkunjung untuk melakukan wisata dengan tujuan mendapatkan suatu unsur ilmu pengetahuan baru tentang pendidikan dan konservasi, yang dimaksud adalah wisatawan pada saat berkunjung tidak hanya sekedar berkunjung akan tetapi mendapatkan pengetahuan agar dapat memahami tentang cara menjaga lingkungan cagar alam serta pengetahuan tentang pendidikan konservasi, yang kedua *old tourism* yang berarti wisatawan biasa yang hanya datang sekedar berkunjung untuk

melihat pemandangan wahana wisata dan tidak memiliki unsur tujuan lain. (Prakoso dkk, 2018).

Destination Management Organization (DMO) merupakan tata kelola destinasi pariwisata yang sinergis maupun struktur yang mana meliputi perencanaan, fungsi koordinasi, pengendalian organisasi destinasi secara inovatif, yang sistemik melalui adanya pemanfaatan jejaring, informasi, implementasi, dan teknologi yang terpimpin dan terpadu dengan adanya peran masyarakat, pelaku asosiasi akademis, industri dan pemerintah yang mana memiliki tujuan, dari proses maupun kepentingan bersama (Pedoman Pembentukan dan Pengembangan DMO, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2010) dalam Endah dkk.

UNWTO (2008) yang mana menyebutkan bahwa DMO mempunyai fungsi dalam memimpin maupun mengkoordinasikan suatu elemen destinasi berupa atraksi, amenitas, aksesibilitas, sumber daya manusia, citra, harga, marketing, dan lingkungan yang berkelanjutan (sustainable). DMO menjadi suatu sudut pandang yang ingin memberikan suatu ruang keterlibatan bagi seluruh pihak stakeholder untuk berpartisipasi untuk mengelola suatu destinasi pariwisata. Dalam artian DMO tidak sekedar berperan untuk mengembangkan suatu produk, promosi maupun marketing, beserta adanya perencanaan maupun penelitian, namun juga bisa bermain peran sebagai sebuah pembentuk tim maupun kemitraan, jalinan masyarakat, serta koordinasi, maupun kepemimpinan (Destination Consultancy Group, 2010) dalam Endah dkk.

Yogyakarta adalah salah satu kawasan di Indonesia yang memiliki banyak pesona alam yang masih alami dan sangat indah sekali, karena suatu keindahan alam alaminya tersebut, membuat wisatawan dan masyarakat selalu kagum akan kawasan kota Yogyakarta yang memiliki banyak sekali tempat wisata alamnya, salah satunya yaitu kawasan ekowisata hutan mangrove di Kulon Progo yang memiliki keunikan wahana wisatanya yang mana memiliki suatu daya tariknya sendiri sehingga wisatawan tertarik untuk berkunjung ke kawasan tersebut.

Salah satunya pengembangan ekowisata hutan mangrove Wana Tirta merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efektifitas dan produktivitas dalam pemanfaatan alam sekitar agar dapat menarik perhatian para wisatawan untuk berkunjung di lokasi ini, selain itu dapat menambah pendapatan dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat yang ada di Dusun Pasir Mendit, Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Derah Istimewa Yogyakarta. Desa atau dusun tersebut berjarak kurang lebih sekitar 47 km kilometer dari kota Yogyakarta. Kurang lebih diperkirakan sekitar 1 jam 9 menit untuk menempuh desa tersebut jika patokannya dari pusat kota Yogyakarta. Kawasan Wana Tirta menjadi kawasan pertama yang di jadikan tempat kegiatan pelestarian konservasi mangrove pada tahun 2009 di Kabupaten Kulon Progo, yang mana pada tahun 2017 beralih menjadi kawasan ekowisata dengan memanfaatkan potensi dalam pengelolaan sumber daya alam hutan mangrove di kawasan Wana Tirta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015, tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2015-2025, pada pasal 17 ayat (3) strategi pengembangan yang mana pengembangan KSPD pantai selatan dan sekitarnya yang bertema wisata alam, pantai, dan konservasi dengan adanya segmen wisatawan, sebagaimana yang di maksud dalam pasal 14 huruf c, meliputi mengembangkan suatu kawasan Pantai Pasir Mendit sebagai suatu kawasan ekowisata mangrove dan budidaya udang.

Partisipasi merupakan suatu aktivitas yang telah menyatu dalam diri setiap individu yang mana didalamnya terdapat suatu proses penekanan terhadap rangsangan yang diterima maupun dirasakan oleh pancaindera setiap individu, sehingga proses ini selalu berlangsung setiap saat, karena bentuk suatu partisipasi itu yakni suatu aktivitas yang menyatu, secara keseluruhan terlihat seperti perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman, kerangka acuan maupun aspek lainnya, pada setiap dalam diri individu yang akan ikut terlibat (Nuraisah dkk, 2020). Partisipasi merupakan suatu hal penting yang mana masyarakat agar bisa memperoleh suatu manfaat dalam kegiatan pengembangan ekowisata (Kaharuddin dkk, 2020).

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam suatu proses mengidentifikasi suatu masalah maupun potensi yang sudah ada pada masyarakat, dalam pemilihan maupun pengambilan suatu keputusan mengenai adanya alternatif adanya solusi dalam menangani suatu masalah, dalam pelaksanaan adanya upaya mengatasi suatu masalah, beserta adanya ketertiban masyarakat pada proses evaluasi perubahan yang telah terjadi (Isbandi, 2007) dalam nurasiah dkk. Pembahasan mengenai partisipasi masyarakat pada pengelolaan wisata, yang mana dilakukan sejauh ini lebih banyak mengungkap suatu keterlibatan masyarakat dari golongan yang memiliki modal, seperti akses keuangan, maupun keterampilan, tokoh masyarakat, anggota LSM, maupun masyarakat pelaku industri wisata (Setiawan B, 2017) dalam kaharuddin dkk.

Secara umum walaupun ekowisata memiliki banyak nilai positif yang ditawarkan lewat konsepnya, namun perlu di ketahui konsep ekowisata masih banyak menimbulkan beberapa kritik dan persoalan terhadap segala pelaksanaannya (Satria Dias, 2009). Rendahnya pengalaman, pengetahuan dan kesadaran masyarakat sekitar mengenai arti dari konsep wisata, dan bisa saja di sebabkan oleh suatu kinerja manajemen pengelolaan dan peran pemerintah dalam mendorong adanya upaya konservasi beserta adanya tindakan yang tegas dalam mengatur suatu masalah kerusakan lingkungan. Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata, pembangunan dan pengembangan ekowisata seringkali ditemukan adanya masalah mengenai peran masyarakat hanya sebagai penonton saja yang kurang memiliki kesadaran, dan motivasi inisiatif yang merespon aktif membantu setiap proses dalam bentuk dukungan terhadap kegiatan pengelolaan ekowisata, terkadang suka melupakan suatu peran masyarakat sebagai stakeholder yang sangat mempunyai keterlibatan pengembangan kawasan wisata. Dan sistem pelaksanaan pengelolaan yang salah, pemahaman tentang konsep ekowisata seringkali di salah artikan di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Tentu saja hal ini disebabkan oleh pengaruh pemahaman atau pengetahuan yang rendah dari makna konsep ekowisata, dan juga lemahnya suatu peran beserta pengawasan dari pemerintah untuk mengembangkan kawasannya dengan baik dan benar.

Salah satu penyebab kurang terkelola objek ekowisata dapat dilihat dari dalam suatu konteks sistem kepariwisataan itu sendiri, karena adanya suatu kendala pada dua kategori sisi yaitu, sisi suplai (product driven), kurangnya suatu pemahaman terhadap pasar (market driven), selain itu ada banyaknya kendala dalam kelembagaan, dan kurangnya upaya dukungan dalam bentuk kebijakan, suatu kapasitas kelembagaan yang rendah merupakan jadi faktor pemicu dari penghambat perkembangan ekowisata di Indonesia dan kejadian ini hampir terjadi pada seluruh level stakeholder dari penyedia jasa pariwisata itu sendiri yang meliputi unsur pemerintah, masyarakat, dan pengusaha (Asmin, Ferdinal, 2014).

Kapasitas kelembagaan yang rendah dapat diakibatkan oleh persepsi yang beragam dalam memaknai sebuah pengertian ekowisata, karena menurut Dowling pengertian dari ekowisata tersusun dalam 80 pengertian yang berbeda satu dengan yang lainnya (Dowling, R.K dan Fennel, 2003) dalam Asmin. Banyaknya kepentingan dan kurangnya kemitraan juga dapat menyebabkan kapasitas kelembagaan menjadi kurang maksimal. Wang menyatakan bahwa ekowisata yang berhasil itu tergantung pada suatu kualitas penyedia jasa wisata meliputi pengembang, perencana, operator dan pengelola (Wang, 2010) dalam Asmin. Perlunya suatu kemitraan antara pemerintah, masyarakat lokal, penyandang dana, LSM, industri wisata dan wisatawan yang bertujuan untuk mencapai sebuah keberhasilan ekowisata (Drumm, A dan Moore, 2005b) dalam Asmin. Untuk kasus yang ada di Indonesia, masalah kualitas aparat pemerintah dan masyarakat maupun jejaring dan kemitraan dalam suatu pengembangan ekowisata memang masih belum maksimal. Kekurangan anggota maupun pegawai yang berkualitas pada suatu kelembagaan lokal dapat menghambat pengembangan ekowisata dan upaya pelestarian sumber daya alam (Machink, 2013) dalam Asmin.

Berikutnya, kurangnya dukungan kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah memang seharusnya menjadi pemicu faktor pendorong, bagi pengembangan atraksi ekowisata. Adanya suatu aktivitas yang memang tidak mendapat dukungan pemerintah atau peraturan yang adil bisa menenggelamkan potensi sumber daya alam untuk dikembangkan menjadi kawasan ekowisata

(Fonseca, 2012) dalam Asmin. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) dari tahun 2010-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, yang menjelaskan tentang suatu paradigma ekowisata dalam suatu pembangunan kepariwisataan di Indonesia belum jelas.

Dalam prakteknya, pemerintah (baik pusat maupun daerah) yang lebih memberikan ruang yang dominan dalam pengembangan wisata massal yang terlihat seperti pada kebijakan anggarannya. Kelemahan dalam suatu pemahaman terhadap konsep ekowisata dapat menjadi penghambat, namun menurut Magio menegaskan bahwa keberhasilan dalam suatu pengembangan ekowisata juga akan ditentukan oleh tujuan pengembangan, pilihan alternatif wisata dan adanya peningkatan suatu efektifitas kelembagaan yang biasanya dapat digunakan sebagai ruang kebijakan (*policy space*) yang mendorong pengembangan ekowisata. Suatu strategi pemasaran wisata di Indonesia juga belum mampu dalam menggali segmen suatu pasar (*niche market*) yang potensial untuk pengembangan ekowisata beserta wisata minat khusus lainnya (Magio dkk, 2013) dalam Asmin.

Pada umumnya kawasan pesisir pantai hampir sering dimanfaatkan oleh manusia dalam bermacam kegiatannya, seperti halnya pertanian, pertambakan, beserta keperluan pariwisata lainnya, akan tetapi bisa saja kegiatan tersebut dapat menjadi suatu sumber dari masalah yang berdampak pada suatu nilai guna pantai secara langsung atau tidak langsung. Banyaknya jumlah populasi manusia beserta aktivitasnya di daerah kawasan pesisir pantai dan daerah pinggir yang merupakan akan menjadi faktor pemicu isu yang terjadi pada kawasan tersebut (Rahim dkk, 2017). Tingkat suatu keterbukaan wilayah hutan mangrove memang cenderung sangat tinggi, lokasi hutan pun terbilang dekat dengan sumber kegiatan perekonomian masyarakat lokal, oleh karena hal tersebut membuat kawasan mangrove memiliki tingkat interaksi sosio ekosistem tinggi. Adanya interaksi antara masyarakat pada kawasan hutan yang tinggi biasanya bisa membawa dampak yang cukup serius, pada ekosistem kawasan atau pada fungsi dan keunikan yang dimiliki (Purwoko & Onrizal, 2002).

Jika dilihat adanya hal tersebut menandakan tingkat suatu kontribusi sektor kehutanan dalam pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat terbilang sangat intensif. Namun, kawasan pesisir dinilai krusial, maka untuk mempertimbangkan beberapa hal dalam melestarikan ekosistem mangrove adalah harus benar-benar mempertahankan peran, fungsi serta keseimbangan ekosistem pada kawasan pesisir. Ada lima faktor penyebab utama yang telah menyebabkan kerusakan pada kawasan ekosistem mangrove yaitu, pencemaran lingkungan yang berlebihan meliputi sampah masyarakat, minyak, dan logam berat, adanya pembangunan dermaga dan perluasan pada areal tambak, kurangnya memperhatikan faktor yang ada di lingkungan dalam melakukan konservasi area mangrove dan adanya penebangan hutan secara berlebihan (Kusmana, 2009) dalam Rahim dkk.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan konsep yang berbeda, maka diperlukannya untuk melakukan penelitian yang membahas "*Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Kelola Ekowisata Hutan Mangrove Wana Tirta di Kabupaten Kulon Progo*". Yang mana penelitian ini fokus ingin melihat perwujudan dari suatu aktivitas inisiatif partisipasi masyarakat maupun peran masyarakat dalam *fase Local Response and Initiative pada teori Greenwood*, dimana peran masyarakat itu sendiri berkaitan dengan adanya keterlibatan secara langsung maupun yang paling berperan dalam pengelolaan ekowisata di kawasan Wana Tirta, dan mencari data untuk diidentifikasi serta di analisis, yang bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor pendorong, faktor pendukung dan faktor kendala maupun hambatan, kelemahan pada kawasan ekowisata yang mana menemukan suatu titik kendala dari keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki oleh kawasan ekowisata.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah di jelaskan di atas, maka peneliti akan menentukan pertanyaan penelitian yang membahas tentang sebagai berikut.

Bagaimana dinamika partisipasi masyarakat dalam tata kelola ekowisata hutan mangrove Wana Tirta di kabupaten Kulon Progo?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian diatas maka secara spesifik, tujuan penelitian ini, sebagai berikut.

Mengidentifikasi dan menganalisis penelitian "*Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Kelola Ekowisata Hutan Mangrove Wana Tirta di Kabupaten Kulon Progo*", dengan menggunakan teori *Greenwood*.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari sebuah penelitian ini adalah supaya dapat mengetahui apa saja yang menjadi dinamika yang terjadi pada pengembangan pengembangan ekowisata hutan mangrove Wana Tirta dan dapat di jadikan referensi evaluasi terhadap pengembangan :

1. Bagi peneliti

Dari hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan manfaat dalam meningkatkan wawasan peneliti mengenai dinamika partisipasi masyarakat dalam tata kelola ekowisata mangrove Wana Tirta di Kabupaten Kulon Progo.

2. Bagi akademisi

Penelitian ini memberikan kontribusi referensi khususnya dalam kajian pengembangan suatu kawasan ekowisata, dan di harapkan menjadi sumber bacaan, patokan panduan, atau tinjauan literature yang relevan bagi mahasiswa lain yang berkemungkinan memiliki judul dan tema penelitian sama, yang mana penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan perbandingan.

3. Bagi pengelola ekowisata

Penelitian ini memberikan kontribusi referensi khususnya dalam kajian pengembangan ekowisata yang dilihat dari tahapan fase, yaitu *fase Local Response and Initiative*, sehingga dapat memberikan manfaat dan gambaran

suatu kawasan dalam pengembangan ekowisata. Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk kelompok pengelola sebagai acuan informasi, referensi dan evaluasi untuk mengetahui dinamika partisipasi masyarakat dalam tata kelola ekowisata hutan mangrove Wana Tirta.

4. Bagi pemerintah

Penelitian ini memberikan kontribusi sebagai acuan evaluasi dan referensi sebagai penimbang bagi pemerintah untuk lebih mempertimbangkan kembali perlunya peran kebijakan yang berkaitan dengan optimalisasi pengembangan suatu kawasan ekowisata hutan mangrove di daerah kawasan tersebut.

1.5. Sistematika Bab

Sistematika pembahasan isi bab dalam skripsi ini, terdiri dari lima sub bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi membahas tentang kajian yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan per sub bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi membahas tentang kajian yang terdiri dari konsep teori yang di gunakan, kemudian lalu di kembangkan sebagai landasan teori yang di gunakan untuk membahas dalam penelitian dinamika partisipasi masyarakat dalam tata kelola ekowisata hutan mangrove, dan berisi kerangka berpikir, *literature review* atau penelitian terdahulu sebagai pembanding perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi membahas tentang kajian yang terdiri dari jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode fenomenologi dengan

pendekatan analisis deskriptif dan sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data seperti observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan teknik analisis data yang di gunakan yaitu reduksi data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang kajian yang akan menjelaskan hasil temuan pada *fase Local Response and Initiative pada teori Greenwood* yang sudah di analisis menggunakan metode fenomenologi dengan pendekatan analisis dekskriptif dan menjelaskan beberapa kendala pada sub pokok pembahasan dinamika partisipasi masyarakat dalam tata kelola ekowisata Wana Tirta.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi membahas tentang kajian yang terdiri dari kesimpulan dari suatu hasil penelitian "*Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Kelola Ekowisata Hutan Mangrove Wana Tirta*" dan memberikan berupa beberapa saran saran yang penting dan baik pada objek penelitian dan pengelola.